

## ABSTRAK

**Muhamad Enjay.** NIM. E. 1711323. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Premanisme Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022.

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan peran Polri dalam penanggulangan premanisme. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Premanisme Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Kota Bogor dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Premanisme Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Kota Bogor dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Premanisme Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Kota Bogor menempuh dengan upaya secara preventif, represif, dan dengan cara preemtif. Cara preventif dilakukan dengan cara melakukan tugas patroli dialogis maupun patroli rayon bertujuan untuk memperkecil ruang gerak bagi para preman untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan. Cara represif dilakukan untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Dan cara preemtif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai aksi premanisme.

Kata Kunci : Pencegahan, Penanggulangan, Premanisme.

## **ABSTRACT**

**Muhamad Enjay.** NIM. E. 1711323. *Prevention and Overcoming of Thugs in the Perspective of Criminal Politics (Study in the Legal Area of the Bogor City Police). Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022.*

*The increasingly troubling acts of thuggery encourage the efforts of various alternatives to overcome these phenomena, both by law enforcers and by legal experts. Must find a formula that is right and can overcome the thugs. Various studies have been conducted to describe the role of the Indonesian National Police in tackling thuggery. In controlling thuggery, the National Police must not use excessive force and must refer to strict rules for the use of force in accordance with human rights principles. The main tasks of the National Police of the Republic of Indonesia are: Maintaining public security and order; Enforce the law; and Provide protection, protection, and service to the community. The objectives of the research are 1) To find out and analyze the Implementation of Police Duties and Authorities in the Prevention and Handling of Thugs according to Law Number 2 of 2002 in the City of Bogor and 2) To find out and analyze the obstacles faced in the Implementation of the Duties and Authorities of the Police in Prevention and Handling of Thugs According to Law No. 2 of 2002 in the City of Bogor and efforts to overcome them. The normative juridical research method is that the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The results showed that the implementation of the duties and authorities of the police in the prevention and handling of thuggery according to Law No. 2 of 2002 in the city of Bogor took preventive, repressive, and preemptive efforts. The preventive method is carried out by carrying out the duties of dialogical patrols and regional patrols aimed at reducing the space for thugs to commit violent crimes. Repressive methods are used to crack down on acts of thuggery that occur in the community. And the preemptive method is carried out by providing legal counseling to increase public legal awareness so that the public knows that the law promises protection and advances welfare which in turn will enjoy the benefits of such protection and welfare as well as the impact of various acts of thuggery.*

*Keywords: Prevention, Prevention, Thugs.*



